

**STRATEGI KAMPANYE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM
MENDULANG SUARA PEMILU LEGISLATIF
(Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)**

(Skripsi)

Oleh

**KGS. FAISAL FATHURRAHMAN
NPM 1416021054**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

STRATEGI KAMPANYE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENDULANG SUARA PEMILU LEGISLATIF (Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)

Oleh

KGS. FAISAL FATHURRAHMAN

Dalam Negara yang memiliki asas Demokrasi, Kampanye merupakan hal yang tidak asing lagi yaitu suatu kegiatan mempersuasi pemilih yang bertujuan untuk menarik para pemilih pada proses pemilihan umum baik itu pemilihan kepala Negara, kepala Daerah maupun posisi jabatan elit politik lainnya. Untuk itu Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang produktif, ikut aktif berperan pada pemilu Legislatif tahun 2019. Tentunya untuk meraih keunggulan suara PKS memiliki cara kampanye yang berbeda dengan partai lainnya. Seperti tahun 2019 lalu PKS mampu meraup suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 khusus pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung. PKS mengalami peningkatan suara di dapil 6, pada tahun 2014 memperoleh 7.395 suara dan pada tahun 2019 memperoleh 13.359 suara. Taktik yang digunakan PKS pun cukup beragam, mulai dari sistem rekrutmen kader, simpatisan, kemudian partisipan. Hal ini untuk dapat meningkatkan kemenangan pada pemilu 2019. Kampanye merupakan alat guna menjalankan cita-cita itu. Strategi menjadi akan sangat penting guna kemenangan pemilu serta cita-cita yang diinginkan partai kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye yang dilakukan PKS dalam pemilu legislatif 2019, yang berhasil menaikkan jumlah kursi pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung di pemilu legislatif. Tinjauan pustaka pada penelitian ini, membahas tentang strategi, meliputi marketing politik, tipe-tipe strategi politik, kampanye politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pedoman wawancara indept interview dan *standart open-ended*, serta *base on data*, agar mendapatkan hasil dan gambaran yang khusus tentang subyek penelitian diharapkan bisa menjawab permasalahan yang peneliti ajukan, meskipun tidak bisa digeneralisir. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa PKS memiliki strategi kampanye yang komprehensif dan terstruktur serta efektif terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dengan melihat program-program dan trik-trik jitu untuk menarik dan mengikat para pemilih.

Kata Kunci : Strategi, Kampanye, Pemilu Legislatif

ABSTRACT

THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY CAMPAIGN STRATEGY IN GETTING VOTE IN LEGISLATIVE ELECTIONS (Study on Electoral District 6 Bandar Lampung City in the 2019 Election)

By

KGS. FAISAL FATHURRAHMAN

In a country with democratic principles, Campaign is a familiar thing, namely an activity to persuade voters that aims to attract voters to the general election process, be it the election of heads of state, regional heads or other political elite positions. For this reason, the Prosperous Justice Party, as a productive party, has an active role in the 2019 Legislative Election. Of course, in order to gain the upper hand, PKS has a different way of campaigning from other parties. As in 2019, PKS was able to gain quite a significant amount of votes compared to 2014 specifically in the Bandar Lampung City Legislative Election. PKS experienced an increase in the number of votes in electoral district 6, in 2014 it received 7,395 votes and in 2019 it received 13,359 votes. The tactics used by PKS are quite diverse, starting from the recruitment system for cadres, sympathizers, then participants. This is to be able to increase winnings in the 2019 election. The campaign is a tool to carry out those ideals. Strategy will be very important for winning the election and the ideals that the party wants in the future. This study aims to find out how the campaign strategy was carried out by PKS in the 2019 legislative elections, which succeeded in increasing the number of seats in the 6 Bandar Lampung City electoral district in the legislative elections. The literature review in this study discusses strategies, including political marketing, types of political strategies, political campaigns. The method used is a qualitative method with indept interview guidelines and open-ended standards, as well as based on data, in order to obtain specific results and descriptions of the research subjects, which are expected to be able to answer the problems that the researcher poses, although they cannot be generalized. Based on the analysis conducted by the researchers, it can be concluded that PKS has a comprehensive and structured campaign strategy that is effective towards the targets to be achieved. By looking at programs and effective tricks to attract and bind voters.

Keywords: Strategy, Campaign, Legislative election

**STRATEGI KAMPANYE PARTAI Keadilan Sejahtera dalam
Mendulang Suara Pemilu Legislatif
(Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)**

Oleh

KGS. FAISAL FATHURRAHMAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **STRATEGI KAMPANYE PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM MENDULANG SUARA PEMILU LEGISLATIF (Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)**

Nama Mahasiswa : **KGS. Faisal Fathurrahman**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416021054

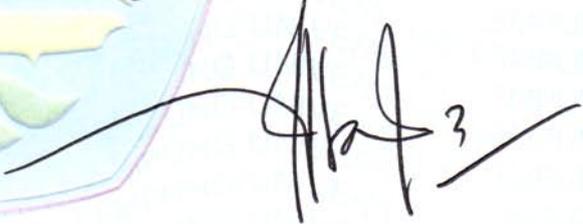
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

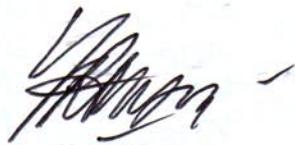


1. Komisi Pembimbing


Drs. Hi. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006


Bendi Juantara, S.IP, M.A.
NIP 19880923 201903 1 011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

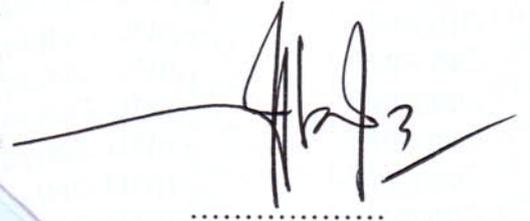
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

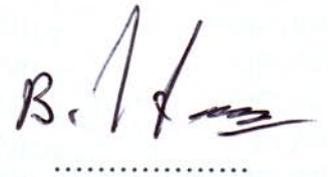
Ketua : **Drs.Hi. Aman Toto Dwijono, M.H.**



Sekretrais : **Bendi Juantara, S.IP, M.A.**



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 1987032 0 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Juli 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan



KGS. Faisal Fathurrahman
NPM.1416021054

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kiagus Faisal Fathurrahman dilahirkan di Telukbetung, Bandar Lampung pada 30 Juli 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari Bapak Kiagus Muhammad Syarifuddin dan Ibu Nurhatijah.

Jenjang penulis dimulai tahun 2000-2001 di TK Madrasah Islamiyah Pesawahan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung dilanjutkan di SDN 2 Talang, Kota Bandar Lampung pada tahun 2001-2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di Perguruan Taman Siswa, Bagian TAMAN MADYA (SMA) Telukbetung Kota Bandar Lampung tahun 2011-2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2014. Semasa kuliah penulis pernah aktif di HMJ Ilmu Pemerintahan Unila. Penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung tahun 2018 di Desa Toto Mulyo, Kec. Gunung Terang, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan Sabar
dan Shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah : 153)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“Musuh yang paling besar dan sulit untuk ditundukkan adalah (Hawa Nafsu)
Dirimu Sendiri, dan yang paling mengerti bagaimana menyikapinya (Hawa
Nafsu) itu sesungguhnya adalah dirimu sendiri, maka tatkala engkau dapat
menerka apa yang datang darinya (Tipu Muslihat), selalu dengan meminta
Pertolongan Petunjuk kepada Allah Subhanahuwata'ala, berusaha dengan
Bertaubat kepadaNYA serta membenahi dirimu walaupun jatuh bangun.”

(Kiagus Faisal Fathurrahman)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat terselesaikan pada waktunya.

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad
Shalallahu'alaihiwassalam serta keluarga dan para sahabatnya.

Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya yang dibuat dengan sederhana ini kepada:

“Ayahku Kiagus Muhammad Syarifuddin dan Ibuku Nurhatijah” terima kasih doa dan kasih sayang yang tiada habisnya serta setiap perjuangan yang telah kalian curahkan untuk Aku dan Adikku. semoga karya ini dapat membuat sebab bangganya kalian dan memberikan kebahagiaan atas segala jerih dan payah yang telah dikerjakan.

“Teruntuk Adikku Dede Natsir” terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan selama dalam masa perkuliahan ini. Semoga kamu menjadi orang yang sukses dalam hal apapun. Aamiin.

“Dan teruntuk Keponakan kesayangan uwakca' Haikal Abdurrahman, semoga kelak jikalau kamu melihat karya sederhana ini, dan kamu masuk pada tahap Pendidikan di Perguruan Tinggi, Aamiin, kamu dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah Menunda-nunda tugas apapun itu, karena semakin kamu menundanya maka akan tertunda juga proses kelulusanmu. Semoga kamu menjadi Anak Sholeh dan sukses. Aamiin.

“Terimakasih atas do’a dan semangatnya kepada Nenekku dan Saudara-saudari dari pada Ayah dan Ibuku, Semoga Allah membalas kalian dengan Kebaikan yang Banyak di Dunia dan Akhirat. Aamiin. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga Allah Subhaanahuwata’ala melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian semua.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah Subhaanahuwata'ala atas nikmat dan karunia Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera dalam Mendulang Suara Pemilu Legislatif (Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sebagai keterbatasan yang ada pada diri Penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini serta kebaikan dan kemudahan yang pernah diberikan kepada penulis, antara lain yaitu:

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu tercinta, Kiagus Muhammad Syarifuddin dan Nurhatijah atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tidak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya, Semoga Allah Subhaanahuwata'ala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kasih sayang, dan surga-Mu serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Bapak dan Ibunda tercinta.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. dan Bapak Darmawan Purba S.IP, M.IP selaku Ketua dan Wakil Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs.Hi. Aman Toto D, M. H selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak Bendi Juantara, S.IP, M.A selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik- baiknya.
6. Bapak Budiharjo, S.Sos, M.IP selaku pembahas dan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sangat baik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
9. DPD PKS Kota Bandar Lampung, Bapak Aep Saripudin, Bapak Agus Djumadi, Bang Suhendro Rihandono, Bapak Joko Mulyono, dan Bapak Raden Cik Awang terimakasih atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penelitian.

10. Kepada Adlul Dwi Cahyo S. IP dan Rama Romadhon S. IP
Jazaakumullahu Khairan atas bantuan, semangat, dan sumbangan ide selama penyusunan skripsi, Alhamdulillah selesai juga.
11. Ikhwanifillah yang semoga Allah meridhoi dan memberkahi kalian semua, Alip, Heru, Daffa, Reza, Akbar, Bang Ardi, Mas Evan, Bang Aris, Ustadz Ghozi, Ustadz Gilang, Ustadz Abdullah, Om Erwin dan ikhwan lainnya yang tidak bisa disebutkan semua, Jazaakumullahu Khairan atas doa dan dukungan kepada penulis selama masa-masa skripsi yang begitu berat dijalani sehingga akhirnya dapat diselesaikan juga, Alhamdulillah.
12. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis di kampus dan berproses bersama dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sudah menjadi mahasiswa akhir seperti sekarang. Semoga kita dapat dipertemukan lagi dilain kesempatan.
13. Teman-teman KKN Desa Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat, Hendri, Ilhan, Hilda, Friska, Mahda, dan Madinar yang telah bersama selama 40 hari serta memberikan pengalaman yang sangat berkesan.

Bandar Lampung 18 Oktober 2021

KGS. Faisal Fathurrahman

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Partai Politik	18
1. Penegertian Partai Politik	19
B. Tinjauan tentang Strategi	21
1. Pengertian Strategi	21
2. Tipe-Tipe Strategi	22
3. Marketing Politik.....	24
C. Tinjauan Kampanye Politik	26
1. Kampanye Politik.....	26
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
a. Wawancara mendalam	34
b. Dokumentasi	36
E. Teknik Analisa Data	37
1. Reduksi Data	37
2. Penyajian Data	38
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi	39
F. Teknik Keabsahan Data	39
1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data	40
a. Triangulasi.....	40
b. Kecukupan Referensial	40

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data	41
3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan	41
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera	42
B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera	46
C. Susunan Kepengurusan Partai	49
D. Tujuan dan Fungsi Partai Keadilan Sejahtera	53
E. Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung	54
F. Gambaran Umum Informan	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Strategi Kampanye DPD Partai Keadilan Sejahtera dalam Mendulang Suara pada Dapil 6 Pemilu Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung 2019	59
B. Strategi <i>Marketing</i> Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2019	67
1. <i>Product</i> (Produk Politik)	67
2. <i>Price</i> (Harga/Biaya Politik)	72
3. <i>Promotion</i> (Promosi Politik)	76
4. <i>Place</i> (Penempatan/Segmentasi Pemilih)	80
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Proliferasi Dinasti Calon Anggota Legislatif Provinsi Lampung pada Pemilu Legislatif 2019	9
2. Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014, serta Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019	11
3. Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Perolehan Jumlah Kursi Berdasarkan Dapil Kota Bandar Lampung pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, 2019	13
4. Informan.....	35
5. Nama-nama Informan dalam Penelitian	57
6. Nama Calon Terpilih Anggota DPRD Dapil 6 Kota Bandar Lampung Pemilu Tahun 2019	61
7. Jumlah Perolehan dan Peringkat Suara Sah Anggota DPRD PKS Dapil 6 Kota Bandar Lampung Pemilu Tahun 2019	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos/Kratein* yang berarti kekuasaan/Berkuasa. Ada bermacam-macam bentuk demokrasi saat ini. seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Dari banyaknya jenis demokrasi yang ada, demokrasi Konstitusional dan demokrasi yang pada hakikatnya mendasarkan diri atas komunisme (demokrasi *Marxisme Leninisme*), adalah dua aliran demokrasi yang berkembang sangat pesat. Dua aliran ini berasal dari eropa. (Yurike 1:17)

Antara dua aliran demokrasi diatas, ada perbedaan fundamental, yaitu bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*Rechsstaat*) yang tunduk kepada *Rule Of Law*. Dan sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*Machsstaat*), dan bersifat totaliter. (Yurike 1:17) Henry B. Mayo dalam buku *Introduction To Democratic Theory* memberi definisi sebagai berikut :

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (*A democratic political is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*)”.

Sebagaimana pendapat Henry B. Mayo tersebut dalam negara demokrasi, menghendaki adanya pemilihan umum. Dalam UUD 1945 Pasal 22E Bab VIIB ayat satu yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Langsung yang berarti dimana pemilu dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat tanpa diwakili oleh siapa pun.

Umum yang berarti semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih calon pemimpinnya di pemilihan umum. Rahasia yang berarti masyarakat mempunyai hak untuk tidak memberi tahu pihak mana pun tentang pemimpin yang ia pilih. Jujur dan adil yang berarti pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil tidak membedakan status sosial ataupun lainnya. Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu syarat bagi negara yang demokrasi. Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan selama satu kali dalam lima tahun.

Pemilu dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). (Yurike 2:2017) Sementara itu, sejalan dengan pendapat Henry B. Mayo bagi Negara yang berasaskan Demokrasi salah satu syarat agar bisa menyampaikan hak untuk memilih pemimpin adalah dengan mengikuti Pemilu. Dan untuk mengetahui bakal calon pemimpin manakah yang ideal maka bisa dilihat dari sang Partai sebagai Perahu yang mengusung bakal calon pemimpin tersebut.

Karena sejatinya definisi partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonmnya untuk menduduki jabatan public. Dalam konteks kebijakan, partai politik memiliki fungsi untuk mengagregasikan atau merepresentasikan berbagai macam kepentingan dan menegosiasikan semua kepentingan tersebut menjadi sebuah kebijakan negara. (Aditya P. dalam Meriam Budiharjo (4:09)

Menurut Edy Sanjaya (1:19) dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia no.2 Tahun 2011. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Syahrial Sharbani dalam Edy Sanjaya (1:19), partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk

merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materil dan ide kepada anggotanya. Banyak ahli memberikan definisi, namun kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil, yang mempersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu.

Partai politik mengandung arti, yaitu : Pertama, organisasi untuk mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Kedua, keanggotaannya terdiri atas pelaku-pelaku politik dan anggota masyarakat biasa. Ketiga, organisasi yang dibentuk untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara bersaing melalui pemilu. Dan keempat, kondisi politik negara yang sesuai adalah salam sistem politik demokrasi.

Dalam Undang-undang no 2 Tahun 2011 yang terletak pada pasal 10 ayat (2) yaitu tentang tujuan khusus partai politik adalah :

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi partai politik diatur pada undang-undang no 2 tahun 2011 terletak pada pasal 11 ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
3. Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (Edy Sanjaya (2:19)

Menurut Edy Sanjaya dalam Ibid (3:19) Peranan partai politik yang dikemukakan dalam kepustakaan ilmu politik, yaitu Pertama, dalam proses pendidikan. Kedua, sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara. Ketiga, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat. Keempat, sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Negara demokrasi modern juga memiliki fungsi parpol secara umum, yakni, sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.

Peran partai politik tidak asing lagi diantaranya, adalah sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, kemudian sebagai penghubung antara masyarakat dengan penguasa. “Namun yang terjadi pada badan partai politik di Indonesia dewasa ini belum berjalan secara maksimal sebagaimana fungsi dan perannya baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat.

Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Kelemahan yang mencolok partai politik yang berorientasi pada masa ini adalah kurang intensif dan efektifnya kerja partai. Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama, dan yang mempunyai visi, misi, program dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan politik itu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebagai akibatnya, partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan artikulasi

dan agregasi kepentingan, belum dapat membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintah.

Partai politik semacam ini hanya berorientasi pada perolehan dukungan suara di daerah pemilihannya dalam rangka memperoleh kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan dan pemenuhan hak konstituen. Hal ini yang membuat partai gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan masyarakat terhadap perolehan suara, hal ini dapat menimbulkan frustrasi bagi kader dan pengurus partai. Kondisi ini akan berakibat kader dan pengurus partai yang berdedikasi tinggi sekaligus memiliki karakter, dengan mudah mengubah garis politik. ”(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html>, diakses pada 25 mei 2020, pukul 14:37 WIB).

Selain itu terjadi kemunduran dari partai politik jika merujuk pada undang-undang no 2 tahun 2011 terletak pasal 11 ayat (1) partai politik berfungsi sebagai Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Nyatanya fungsi partai politik saat ini diluar jalur sebagaimana mestinya. Partai politik dinilai lembaga yang berpotensi semakin menyuburkan terbentuknya Dinasti Politik, karena pada proses rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik banyak terjadi fenomena hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik.

Aprilia dalam penelitiannya (2:19) Dinasti politik, Rekrutmen didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai juga tidak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan para pengusaha. Mayoritas partai politik mendasarkan sumber rekrutmen dari lingkungan keluarga dan kerabat para elite partai sehingga cenderung berlangsung tertutup, eksklusif, dan nepotis. Dampak dari realitas ini adalah tersisihnya mereka yang kompeten, memiliki kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan, rekam jejak yang baik, serta berintegritas. Mereka digantikan oleh orang-orang yang mengandalkan popularitas, hubungan nepotis dengan pimpinan partai, dan memiliki modal finansial.

Pendapat lain dikemukakan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadani. Menurutnya, bakal calon legislatif dari dinasti politik tertentu masih banyak digunakan partai politik pada pemilu 2019. Hal ini terjadi akibat kegagalan kaderisasi dan rekrutmen partai politik. (Rahardian dalam Aprilia (3:19).

Akibat kegagalan rekrutmen pada Partai Politik, di Lampung sendiri dikhawatirkan terindikasi akan adanya Dinasti politik pada Pemilihan Legislatif 2019, beberapa bakal calon legislatif dikatakan memiliki hubungan keluarga (Ihsanuddin dalam Tribun Lampung.com, diakses pada tanggal 26 Mei 2020, pukul 22.01 WIB). Berikut ini adalah beberapa Proliferasi Dinasti bacaleg di Provinsi Lampung pada Pileg 2019 :

Tabel 1. Data Proliferasi Dinasti Calon Anggota Legislatif Provinsi Lampung pada Pemilu Legislatif 2019.

No	Nama Partai Politik	Nama Caleg yang Diusung	Hubungan Keluarga	Jumlah
1	PDI-P	Eva Dwiana Herman HN	Istri Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung)	7.
2	PDI-P	Rahmawati Herdian	Anak Eva Dwiana Herman HN dan Herman HN (Wali Kota Bandar Lampung)	
3	PDI-P	Yose Rizal (Politikus PDIP)	Suami Kostiana	
4	PDI-P	Kostiana	Istri Yose Rizal (Politikus PDIP)	
5	PDI-P	Zainal Abidin (Mantan Bupati Lampung Utara)	Ayah Ardian Syaputra	
6	PDI-P	Lesty Putri Utami	Putri sulung Mukhlis Basri (mantan Bupati Lampung Barat)	
7	PDI-P	Ferliska Ramadhita Johan	Putri Ali Johan Arief (Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Timur dan Ketua DPRD Lampung Timur)	
8	Partai Gerindra	Gunadi Ibrahim (Ketua DPD Partai Gerindra Lampung)	Suami Dwita Ria Gunadi	4.
9	Partai Gerindra	Dwita Ria Gunadi	Istri Gunadi Ibrahim	

10	Partai Gerindra	Giri	Putra Gunadi Ibrahim dan Dwita Ria Gunadi	
11	Partai Gerindra	Ardian Syaputra	Anak Zainal Abidin (Mantan Bupati Lampung Utara)	
12	Partai Nasdem	Frans Agung Mula Putra	Putra Abdurachman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)	4.
13	Partai Nasdem	Richard Maulana Putra	Putra Abdurachman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)	
14	Partai Nasdem	Fauzan Sibron (Caleg Petahana)	Menantu Zamzani Yasin	
15	Partai Nasdem	Zamzani Yasin (Caleg Petahana)	Mertua Fauzan Sibron	
16	PAN	Aries Sandi Darma Putra	Putra Abdurachman Sarbini (Mantan Bupati Tulang Bawang)	3.
17	PAN	Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI)	Kakak Fitoni Hasan	
18	PAN	Fitoni Hasan	Adik Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI)	

Sumber: TribunLampung.co.id Tahun 2018

Selain itu sebagaimana terdapat pada undang-undang no 2 tahun 2011 terletak pada pasal 11 ayat (1) partai politik berfungsi sebagai sarana Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan

dan menetapkan kebijakan negara. Sayangnya berdasarkan realita hasil penelitian yang dilakukan oleh Rofika di daerah kota Pekanbaru bahwa penyerapan aspirasi oleh partai politik berjalan sangat tidak efektif dimana partai politik baru akan mendekati konstituen hanya menjelang diadakannya Pemilihan Umum baik Eksekutif maupun Legislatif.

Selain itu, kebanyakan dari partai politik hanya menarik simpati masyarakat saja tanpa memperhatikan fungsinya tersebut. Di lapangan masyarakat mendapatkan bahwa partai politik tidak lagi menyalurkan aspirasi mereka terhadap pemerintah secara efektif dan hanya mengutamakan kepentingan individu maupun kelompok. (Rofika S. 9,10:14)

Pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung pada tahun 2014 dan 2019 yang melibatkan seluruh masyarakat Lampung untuk menggunakan Hak pilihnya sebagai warga Negara Indonesia. Berikut data perolehan suara partai politik pemilu legislatif tahun 2014 dan 2019 kota Bandar Lampung. Beserta data perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan jumlah perolehan kursi berdasarkan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung 2014, 2019.

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014 serta Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2019.

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara 2014	Perolehan Suara 2019
1	PKB	21.208	28.869
2	GERINDRA	38.971	68.445

3	PDIP	84.552	85.988
4	GOLKAR	41.250	48.600
5	NASDEM	42.552	55.460
6	GARUDA	-	3.285
7	BERKARYA	-	10.106
8	PKS	42.918	68.275
9	PERINDO	-	20.767
10	PPP	34.852	19.780
11	PSI	-	6.835
12	PAN	63.930	58.866
13	HANURA	24.616	6.103
14	DEMOKRAT	38.719	38.778
15	PBB	5.050	1.802
16	PKPI	7.378	1.633
Total Jumlah Suara		445.996	523.592

Sumber: KPU Provinsi Lampung Tahun 2014 dan 2019

Tabel 3. Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera dan Perolehan Jumlah Kursi Berdasarkan Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, 2019.

No. Dapil	Nama Caleg DPRD Nama Daerah Pilihan	Jumlah Perolehan Suara dan Kursi	
		2014	2019
1.	Muchlas Ermanto Bastari, Hi, SE., MM Kedaton Raja Basa Tanjung Senang Labuhan Ratu	2.569 Total Suara (8.293)	-
		1 kursi	
2.	Nandang Hendrawan, SE. Sukarame Sukabumi Wayhalim	3.020 Total Suara (8.799)	-
		1 kursi	
3.	Handrie Kurniawan, SE., M.IP. Panjang Bumi waras	2.427 Total Suara (6.461)	-
		1 kursi	
4.	Grafieldy Mamesah Teluk Betung Selatan Teluk Betung Barat Teluk Betung Utara Teluk Betung Timur	1.646 Total Suara (6.758)	-
		1 Kursi	

5.	Agus Djumadi, A. Md.	1.039	
	Tanjung Karang Timur Tanjung Karang Pusat Enggal Kedamaian	Total Suara (5.212)	-
6.	Syarif Hidayat	1765	-
	Tanjung Karang Barat Kemiling Langkapura	1 kursi	-
1.	Yuni Karnelis, STP.		2165
	Telukbetung Selatan Telukbetung Barat Telukbetung Timur Telukbetung Utara	-	Total Suara (9.977)
2.	Sofyan Sauri, S.PD		4054
	Tanjung Karang Barat Tanjung Karang Timur Tanjung Karang Pusat Enggal	-	Total Suara (13.220)
		-	1 kursi
3.	Aep Saripudin SP.		3.492
	Kedaton Labuhanratu Wayhalim	-	Total Suara (11.131)
		-	1 kursi
4.	Sidik Efendi SH. MH.		3.462
	Sukarame Tanjung senang Sukabumi	-	Total Suara (13.236)
		-	1 kursi
5.	Hi. Handrie Kurniawan, S.E., M. IP.		1.822
		-	Total Suara

	Panjang Kedamaian Bumiwaras		(7.352)
		-	1 kursi
6.	Agus Djumadi, A. Md.	-	3.432
	Rajabasa Kemiling Langkapura	-	Total Suara (13.359)
Jumlah		42.918 Suara	68.275 Suara
		5 Kursi	6 Kursi

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2014 dan 2019

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung tahun 2014 ke tahun 2019 memiliki peningkatan jumlah partai, diikuti oleh 12 partai politik pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 16 partai politik. Hasil perolehan suara pada pemilihan umum legislatif kota Bandar Lampung juga mengalami pelonjakan pada jumlah perolehan suara dari tahun 2014 ke tahun 2019 khususnya pada Partai Keadilan Sejahtera pada dapil 6 yang meningkat secara signifikan. PKS memiliki kenaikan pada tahun 2014 memperoleh 7.395 suara di Dapil 6 dan pada tahun 2019 memperoleh 13.359 suara. Hasil persentasi perolehan suara partai politik tidak terlepas dari adanya Program Kampanye yang dilakukan oleh partai tersebut untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap Daftar Calon Tetap (DCT).

Contohnya Partai Keadilan Sejahtera, sebagaimana hasil prariset yang dilakukan oleh peneliti di DPD PKS Bandar Lampung, Suhendro Selaku sebagai jabatan kepala unit kastrat (kajian strategis) sebagai pelayanan wawancara mengatakan :

“Penghapusan Pajak Sepeda Motor

1. Penghapusan pajak motor akan signifikan membebani APBD?

Pajak Motor adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah Provinsi. Data dari beberapa daerah menunjukkan rata-rata pemasukan dari pajak motor hanya 6-8% dari total APBD. contoh Jawa Barat, pajak sepeda motornya 2.5 T sedangkan APBD nya 33T, ini cuma 7.5% persen dr APBD sehingga tidak signifikan.

Gimana menutupinya? desain otonomi daerah kita konsentrasinya di kota kabupaten sedangkan fungsi pemerintah provinsi kebanyakan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat atau sekedar fungsi kordinatif, sehingga tidak perlu pusing mencari penggantinya, cukup dengan penghematan saja seharusnya mudah. apalagi menurut MenPAN tingkat keborosan APBN/APBD itu 30%, jd jika kita biarkan 6-8% uang APBD dr pajak sepeda motor ini tetap di kantong rakyat, justru kita membantu menekan pemborosan. PKS sudah siap dengan draft RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera dalam

Mendulang Suara Pemilu Legislatif.(Studi pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2014 dan 2019)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera dalam Mendulang Suara Pemilu Legislatif. (Studi pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye PKS dalam perolehan suara Pemilu legislative (Studi pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019)?.

D. Manfaat Penelitian

Adanya hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan studi tentang ilmu pemerintahan khususnya studi tentang pemilu legislatif.
2. Secara Praktis Memberikan sumbangan pemikiran partai PKS, dalam merencanakan strategi kampanye untuk perolehan suara Pemilu legislatif 2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Partai Politik

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (*legitimate*) dan damai.

Menurut Haricahyono (1991) partai politik merupakan salah satu prasyarat bagi negara yang merdeka dan berdaulat. Partai politik tidak saja sebagai salah satu sarana penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah negaranya, akan tetapi partai politik sekaligus terlibat dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai lembaga negara yang ada (Haricahyono, 1991: 189).

Berbeda dengan perkembangan partai-partai di banyak negara maju, di negara-negara berkembang kebangkitan dan aktivitas partai politik seringkali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pembentukan kerangka sistem politik, pengabsahan lembaga pemerintah, serta usaha-usaha

untuk memperkuat persatuan nasional. Dalam kaitan ini partai politik seringkali tidak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyaluran tuntutan yang absah kepada penguasa, tetapi semata-mata sebagai elemen dalam strategi persatuan nasional dan pengontrolan perbedaan pendapat (Rohyati, 2006: xix).

1. Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik secara etimologis menurut Assiddiqie (2006) berasal dari kata part yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik (Syafa'at, 2011: 30).

Pengertian partai politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli politik di dunia. Mengutip pendapat dari Carr dalam Cangara (2011: 116), partai politik adalah:

“political party is an organization that attempts to achieve and maintain control of government” (Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah).

Partai politik menurut Budiardjo (2008: 403) merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan yang dimaksud dalam pengertian ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum. Di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi partai politik menurut Carl J. Friedrich dalam (Budiardjo 2008: 404) adalah:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil secara materil. (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders control of a government, with the further objective of giving to members of*

the party, through such control ideal and material benefits and advantages.)”

B. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Prahalad (2005) pengertian strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan masa depan. Strategi lebih mengarah pada tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Didalam strategi terdapat susunan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Freischlad (2003) menyatakan:

“Tujuan dari setiap strategi bukanlah kemenangan yang dangkal, tapi perdamaian yang mendasar, penerangan program-program yang tepat dan reformasi. Jika tujuan jangka panjang strategi ini tidak tampak, misi bagi kemenangan akan tampak sebagai perjuangan bagi kekuasaan dan kekayaan pribadi, sebagai sebuah perjuangan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Tujuan utama penggunaan strategi ini adalah memperoleh kekuasaan dan pengaruh dengan memperoleh hasil yang baik dalam pemilu umum legislatif maupun eksekutif, sehingga politik dapat diwujudkan dan suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai. Upaya memperebutkan suara

pemilih yang cukup dalam pemilihan umum bukanlah persoalan yang mudah. Oleh karena itu untuk dapat meraihnya dibutuhkan perencanaan strategi yang merupakan pemikiran dan perumusan yang meliputi cara bersikap, tujuan, dan alternatif untuk bersikap atau bertindak, pilihan optimal yang dimiliki dan penetapan instruksi untuk mewujudkannya secara rasional. Pemikiran dan perumusan ini dilakukan secara sistematis dan mengarah kedepan (Schroder, 2004: 13).

2. Tipe-Tipe Strategi

Strategi politik dalam berkampanye menurut Newman and Sheth dalam (Nursal, 2004:159-160) ada beberapa kategori strategi yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Strategi penguatan (*reincforcement strategy*), yaitu strategi yang dapat dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye. Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk menguatkan image kandidat untuk pilkada selanjutnya.
- b. Strategi bujukan (*inducement strategy*), diterapkan jika citra kandidat tidak cocok dengan persepsi warga walau kinerjanya baik di mata pemilih.
- c. Strategi rasionalisasi (*rationalization strategy*), yaitu strategi yang diambil ketika kinerja kandidat/partai politik cocok dengan citra yang

telah dibangunnya. Rasionalisasi strategi perlu diambil agar tidak mematkan citra dimata para pemilih (voters) pada saat pilkada.

- d. Strategi konfrontasi (*confrontation strategy*), yaitu strategi yang diterapkan oleh para kandidat yang salah membangun citra. Misalnya citra yang dibangun ternyata tidak sesuai dengan kinerjanya. Oleh karena itu ia harus merombak habis citra dan kinerjanya dalam pilkada berikutnya agar dapat dipilih oleh pemilih yang semakin cerdas dan kritis. (Nursal, 2004:159-160).

Strategi menurut Koten dalam Salusu (1994: 104-105) strategi dibagi menjadi beberapa tipe, diantaranya adalah :

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, inisiatif-inisiatif strategi yang baru yang membahas apa yang harus dilakukan dan untuk siapa;

- b. *Program Strategy* (strategi program)

Strategi ini terfokus pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu yang dilancarkan dan pada intinya ingin melihat apa dampak strategi tersebut dalam sasaran organisasi.

- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya)

Strategi ini memutuskan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan dan teknologi.

d. *Institutional Strategy* (strategi intitusi)

Fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Berdasarkan pemamparan diatas, dalam penelitian ini Partai PKS sebagai partai politik atau organisasi politik menggunakan 2 jenis strategi yang berbeda untuk mendapat dukungan masyarakat yaitu, Strategi penguatan (*reinforcement strategy*), adalah strategi yang dapat dilakukan oleh kandidat yang telah dipilih dengan cara membuktikan janji-janji politiknya pada saat kampanye.

Formulasi dan implementasi kebijakan pro-publik, anggaran berorientasi gender, dan sebagainya bisa digunakan untuk menguatkan image kandidat untuk pilkada. Kemudian strategi pendukung sumber daya (*Resource Support Strategy*), adalah Strategi ini memutuskan perhatian pada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan dan teknologi.

3. Marketing Politik

Marketing politic adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu didalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih untuk memilih kontestan tertentu (Nursal dalam Efriza 2012:476). Makna

politis inilah yang menjadi output penting *marketing politic* yang menentukan, pihak mana yang akan dipilih.

Konsep pemasaran atau marketing yang selama ini dikenal dengan bauran pemasaran konvensional McCarthy (1960), yaitu terdiri atas komponen „4-Ps“ (*product, price, place and promotion*), kini telah berkembang dan sekaligus mempopulerkan salah satu pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran politik atau yang disebut dengan *political marketing*.

Menggunakan “4-Ps” marketing dalam dunia politik menjadikan *marketing politic* tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi jauh lebih komprehensif. *Marketing politic* menyangkut cara sebuah institusi politik atau partai politik dalam menformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik.

Firmanzah (2012: 201-209) mengembangkan dan menguraikannya, dalam proses *political marketing*, digunakan penerapan 4Ps bauran marketing, yaitu:

- a. Produk (*product*) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan kepada konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas partai, serta ideologi. Baik dimasa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik.
- b. Promosi (*promotion*) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang di mix sedemikian rupa sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.

- c. Harga (*price*) mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara.
- d. Penempatan (*place*), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berarti sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.

C. Tinjauan Kampanye Politik

1. Kampanye Politik

Kampanye merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku pemilih. Perubahan ini ingin dicapai melalui himbuan, ajakan, dan janji sehingga membuat warga atau kelompok masyarakat tertarik untuk menjatuhkan pilihan politiknya pada partai atau kandidat tertentu.

Partai politik atau seorang kandidat pemilihan kepala daerah, dalam upaya untuk menarik simpati dari masyarakat harus melakukan kampanye. Pengertian kampanye dalam buku Komunikasi Politik oleh Dan Nimmo adalah “upaya untuk mempropagandakan pemberi suara yang potensial” (Dan dkk, 2006).

Merujuk kepada definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para pakar maka setiap aktifitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal yakni:

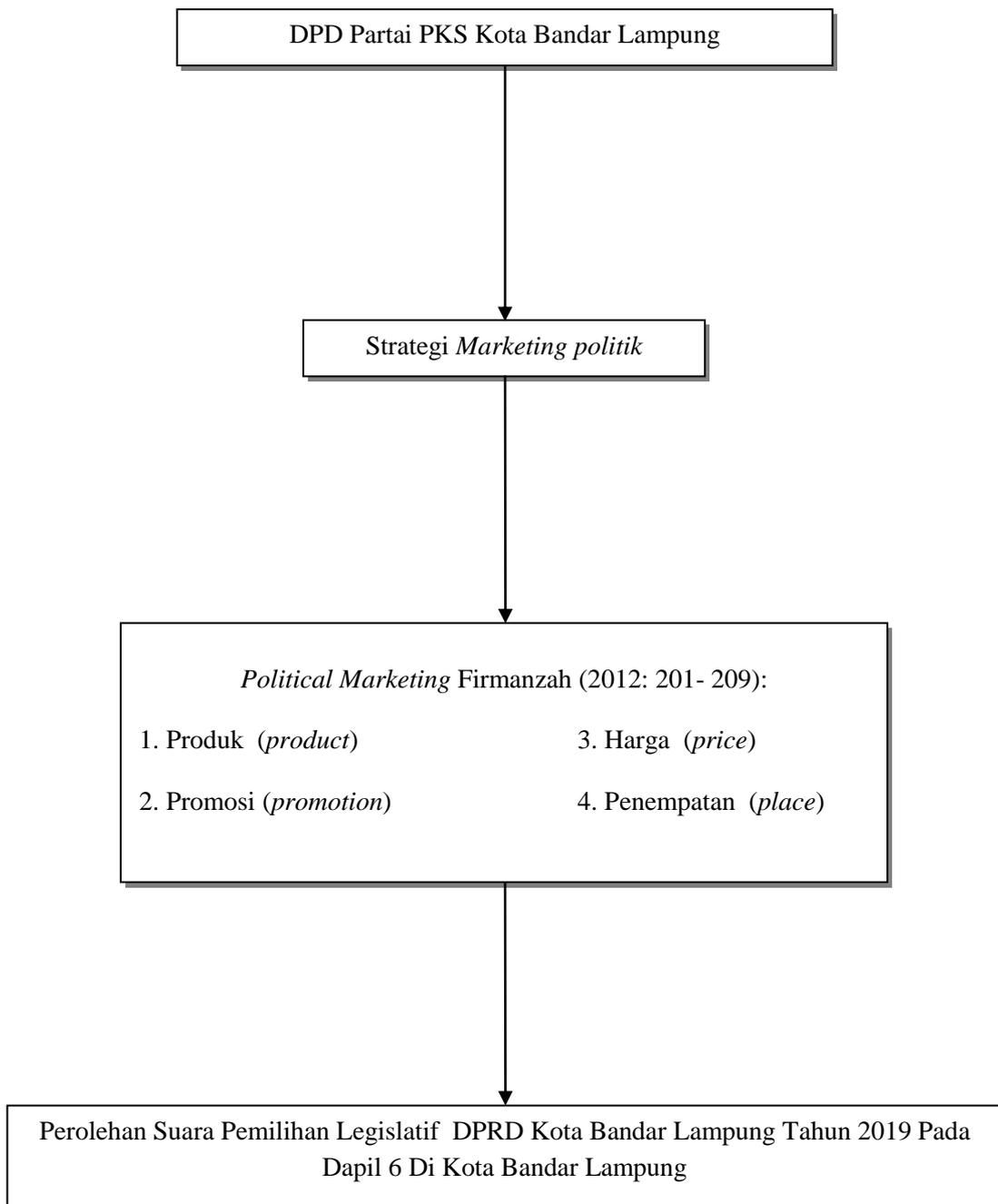
- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Kampanye merupakan bagian penting atau salah satu bentuk penting dari pemasaran politik. Dengan semakin ketatnya persaingan politik karena berlangsungnya sistem multi partai dan pemilihan secara langsung saat ini, maka pemasaran politik semakin diperlukan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana tahapan dan proses kampanye dijalankan, ada beberapa model kampanye meliputi: Model Komponensial Kampanye, Model Kampanye *Ostergaard*, *The Five Functional Stages Development Model*, *The Communicative Functions Model*, *Model Kampanye Nowak* dan *Warneryd*, dan *The Diffusion of Innovations Model* (Venus dkk., 2004).

Firmanzah mengatakan bahwa penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai pemasaran politik (*political marketing*). Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia politik sehingga diperlukan strategi tertentu untuk dapat memenangkan persaingan tersebut. Seperti pada pemasaran komersil, maka Pemasaran Politik juga terdapat produsen (pelaku politik), produk (produk politik: *Person, Party, Policy melalui Presentation*) dan konsumen (*electorate*) (Firmanzah, 2012).

D. Kerangka Pikir

Penulis memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera dalam Mendulang Suara Pemilu Legislatif. (Studi pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2014 dan 2019) ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penulis menggunakan teori *political marketing* Firmanzah (2012: 201-209)4P terdiri dari *promotion* (Produk), *product* (Promosi), *Price* (Harga) dan *Place* (Tempat).



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti 2020

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan tipe penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moelong penelitian kualitatif, adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Adapun datanya berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen (Herdiansyah, 2012:9).

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, yang lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sehingga, penelitian kualitatif menurut peneliti merupakan suatu prosedur penelitian yang bersifat deskriptif (Moleong, 2000 :6). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan memaparkan dan mengungkap fakta-fakta berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-

dokumen lainnya. Subjek yang akan dijadikan penelitian yaitu tim pembinaan partai politik PKS beserta caleg dalam melakukan strategi kampanye program PKS untuk mendulang suara pada pemilihan umum legislatif pada dapil 6 Kota Bandar Lampung tahun 2019.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Agar tidak dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan walaupun data itu menarik (Moleong, 2007: 94).

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu objek adalah bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi social yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), perilaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi karena terlalu luasnya masalah. Maka untuk menghindari pembatasan masalah yang berlebihan diperlukan pembahasan yang disebut fokus (Sugiyono,2009:207).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada:

1. Strategi Kampanye PKS dalam mendulang suara di dapil 6 kota Bandar Lampung pada Pemilu Legislatif 2019.
2. Dampak Strategi kampanye PKS untuk mengembalikan kepercayaan Masyarakat terhadap partai politik sebagai salah satu lembaga sarana Penyerap, penghimpunan, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara dalam perolehan suara di Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu Legislatif 2019.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu perlu pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja yang akan dilakukan di Kota Bandar Lampung.

Adapun alasan peneliti memilih Kota Bandar Lampung karena Kota Bandar Lampung adalah tempat yang sesuai dengan penelitian ini. Sebab geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga yang sesuai, kemudian dari tingkat kesadaran politik masyarakat yang cukup tinggi yaitu 88,6%.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini, terdapat tahapan proses yang peneliti lakukan didalamnya. Adapun proses awalnya yaitu meminta izin terlebih dahulu dan memperkenalkan diri kepada salah satu Anggota Komisioner DPD PKS kota Bandar Lampung dan anggota atau pengurus partai-partai politik yang terkait didalam penelitian penulis dengan membawa surat izin formal dari Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan menjalin hubungan baik dengan instansi yang bersangkutan tersebut.

Setelah itu peneliti memaparkan maksud dan tujuan peneliti untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak didalamnya. Pada tahapan selanjutnya, dilakukan hubungan yang lebih akrab. Dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari informasi secara rinci agar peneliti dapat menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta fenomena yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen, dan rekaman (*record*) yang tersedia.

Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti menciptakan *rapport*, pemilihan informan, pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data. Karena itu dalam bagian ini akan dibahas secara berturut-turut; Penciptaan *rapport*, Pemilihan informan, Pengumpulan data dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara, Pengumpulan data dari sumber non-manusia dan Pencatatan data/informasi hasil pengumpulan data (Ivanovich, 2003 : 3).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data penelitian dengan cara :

1. Wawancara mendalam (*in depeth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan dan sikap dari para informan. Dalam konteks penelitian ini saya menggunakan teknik wawancara semi struktur agar dapat mengeksplorasi jawaban informan.

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel dari pada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada

informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Tujuan dari wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya (Fylan, 2005 : 66).

Tabel 4. Informan

No	Nama Informan	Alamat	Jabatan
1.	Aep Saripudin, SP.	Rajabasa, Bandar Lampung	Staf Protokol Wakil 2 DPRD Kota Bandar Lampung, ketua DPD PKS 2019, Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPTW PKS Provinsi Lampung.
2.	Agus Djumadi, A.Md	Jl. Geriya Sejahtera, Langkapura, Bandar Lampung	Ketua Fraksi PKS, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung, ketua MPD (Majelis Pertimbangan Daerah), Sekertaris DPD PKS 2019, Anggota Badan Anggaran DPRD kota Bandar Lampung, Bisnis vendor Perusahaan Kontraktor Komisaris PT. WSA
3.	Drs. Joko Mulyono, M. AP	Jl. Onta III sukamenanti baru, Kedaton, Bandar Lampung.	Ketua Komisi Kebijakan Publik MPW Lampung, Majelis Pertimbangan Wilayah DPTW PKS Provinsi Lampung.

4.	Raden Cik Awang, ST.	Perumahan Griya Assalam, Rajabasa, Bandar Lampung	Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPD PKS Kota Bandar Lampung, Wirausaha Konveksi.
5.	Suhendro Prihandono, S.IP	Perumahan Vila Marina, Blok D.52, Suka Bumi, Bandar Lampung.	Sekbid/Kabit 2018- 2020 Politik Hukum dan Keamanan DPD PKS Kota Bandar Lampung, Ketua Bidang Hukum Kebijakan Publik DPD PKS Bandar Lampung 2020-2025, Tenaga Ahli Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandar Lampung.

Sumber: Diolah Peneliti 2020

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis sebagai acuan dan sifatnya tidak mengikat sehingga banyak pertanyaan baru yang muncul pada saat wawancara terkait dengan Bagaimana strategi kampanye program PKS berhasil mendulang suara khususnya dalam pemilihan legislatif Dapil 6 Kota Bandar Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan

bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-menyurat, peraturan- peraturan dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan penelitian di lapangan.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (2014 : 12). Adapun penjelasan dari teknik analisis data Model Interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan tentang Strategi kampanye Program PKS terhadap perolehan suara pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah reduksi data dilakukan, data yang didapatkan telah berbentuk selanjutnya, akan memecah tema-tema tersebut kedalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan sub tema yang diakhiri dengan memberikan kode dari sub tema sesuai dengan verba tim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

Display data akan memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami peristiwa maupun kejadian yang terjadi. dalam melakukan *display data* selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan) dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang data yang ada. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian

Dalam penelitian ini rencana analisis data yang saya lakukan adalah, hasil wawancara akan saya transkripsi, kemudian dari hasil transkripsi tersebut informasi akan saya pilah berdasarkan fokus penelitian yang saya lakukan, termasuk membaginya dalam tema-tema sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Analisis akan berdasarkan pada sintesis informasi yang saya peroleh dilapangan berdasarkan teori yang saya pakai.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain (Moleong, 2011: 330). Ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2011:330).

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku tentang evaluasi strategi, dan partisipasi masyarakat, catatan penelitian, dokumentasi foto-foto dan rekaman wawancara peneliti dilapangan.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesempatan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabel data yang disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dulunya bernama Partai Keadilan (PK) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia yang berawal dari gerakan – gerakan dakwah di berbagai kampus Indonesia. Slogan PKS adalah ‘Berkhidmat Untuk Rakyat’ dan didirikan pada 21 Mei 1998, berupa penggabungan dari Partai Keadilan serta PK Sejahtera. Dalam perjalanannya, PKS beberapa kali mengalami konflik internal, misalnya ketika pada 2013 Luthfi Hasan Ishaq ditangkap oleh KPK atas dugaan suap impor daging sapi sehingga ia harus mundur dari jabatan Presiden PKS. Berikut ini adalah sekelumit pembahasan mengenai sejarah partai PKS.

1. Lembaga Dakwah Kampus, Cikal Bakal PKS

Asal usul Partai Keadilan Sejahtera atau sejarah partai PKS bisa ditelusuri dalam sejarah partai PKS mulai dari Gerakan Dakwah Kampus yang menyebar di berbagai universitas di Indonesia pada tahun 1980an. Bisa dikatakan pelopor gerakan ini adalah Muhammad Natsir, yaitu mantan Perdana Menteri Indonesia dan bagian dari sejarah Partai Masyumi yang dibubarkan pada tahun 1960.

Muhammad Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Pada awalnya lembaga ini memfokuskan diri pada usaha untuk mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling penting adalah dalam memprakarsai kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah sebagai afiliasinya, dengan dipimpin oleh Imaduddin Ibrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan bertempat di Masjid Salman, ITB.

Memasuki tahun 1985, Orde Baru mewajibkan semua organisasi massa atau Ormas menjadikan Pancasila sebagai asas sehingga sejumlah tokoh Islam marah dan menyebut bahwa Rezim Orba telah memperlakukan politik Islam sebagai 'Kucing Kurap'.

Di saat yang sama, Jamaah Tarbiyah mendapatkan momentum di kalangan mahasiswa yang menjadi kader Rohis dan mahasiswa yang menjadi aktivis dakwah di kampus – kampus. Pada tahun 1993 seorang kader dari Jamaah Tarbiyah yaitu Mustafa Kamal memenangkan pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI sebagai kader Jamaah pertama yang mendapatkan kekuasaan di tingkat Universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah yang juga seorang kader Jamaah Tarbiyah, terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa UI.

Para anggota Jamaah Tarbiyah lalu mendirikan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menjadi unit – unit kegiatan mahasiswa secara resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, misalnya UI yang dilakukan terutama oleh para aktivis dari Forum Studi Islam. Pada saat itu, sebutan

‘usrah’ yang berarti ‘keluarga’ kerap digunakan untuk menyebut kelompok – kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan menggunakan sistem sel seperti Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader – kadernya, dan juga mulai dilakukan berbagai pelatihan untuk anggota.

Usrah adalah berbagai kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat, dan digabungkan melalui suatu struktur hierarkis. Kebanyakan anggotanya tidak saling mengenal anggota kelompok lainnya. Melalui struktur organisasi semacam ini, aktivitas dakwah kampus berkembang semakin pesat dan masjid – masjid kampus menjadi pusat aktivitasnya.

2. Pendirian Partai Keadilan

Berbagai faksi dan kubu di dalam LDK kemudian sepakat untuk membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSDLK) pada tahun 1986. Sejarah partai PKS dimulai ketika FSLDK mengadakan pertemuan berkala setiap tahunnya. Pada pertemuan tahunan ke 10 di Malang tahun 1998, momentum tersebut dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI yang dipimpin oleh Fahri Hamzah muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal dalam menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto. Tidak lama setelah mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI mempertimbangkan pendirian sebuah partai Islam.

Partai tersebut lalu dinamakan Partai Keadilan (PK). KAMMI dan PK menyatakan dengan tegas bahwa tidak memiliki hubungan formal, walaupun para tokoh elite KAMMI berkontribusi dalam pembentukan PK. Deklarasi PK dilakukan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta pada 20 Juli 1998 dengan Presiden pertamanya yaitu Nurmahmudi Isma'il.

Pada pemilu 1999, PK mendapatkan perhatian dari banyak pihak sebagai satu – satunya parpol yang memiliki struktur kepengurusan yang transparan, terorganisir dengan rapi dan mempunyai agenda program yang jelas. Tidak seperti berbagai partai islam lain yang bergantung pada ketokohan satu figur, PK justru menegaskan pentingnya egalitarianisme dalam Islam dan kekuatan kolektif, juga tidak banyak memberi ruang untuk tampilnya seorang pemimpin kharismatik. Ciri khas PK adalah minimnya tokoh yang memiliki magnet yang berpotensi untuk dipilih, tetapi para kader dan simpatisannya dituntut untuk patuh terhadap norma – norma agama dan loyal pada garis partai.

Dalam keikutsertaan sebagai parpol pada Pemilu legislatif 1999, PK mendapatkan 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional, dan mendapatkan jatah sebanyak 7 kursi di DPR. Walaupun mendapatkan suara, tetapi PK gagal untuk memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen sehingga terpaksa bergabung melalui *stembus accord* dengan delapan parpol berbasis Islam lainnya pada bulan Mei 1999.

Kemudian Nurmahmudi ditawarkan jabatan sebagai Menteri Kehutanan dalam Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid pada bulan Oktober 1999. Tawaran tersebut diterima dan jabatan presiden PK diserahkan kepada Hidayat Nur Wahid, doktor lulusan Universitas Islam Madinah sejak 21 Mei 2000.

Kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen di sejarah pemilu di indonesia pada tahun 1999 membuahkan konsekuensi penggantian namasesuai dengan peraturan pemerintah. Maka pada tanggal 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi untuk Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau setingkat propinsi dan tingkat Dewan Pimpinan Daerah atau setingkat kabupaten dan kota. Sehari setelahnya, PK telah resmi mengubah namanya menjadi PKS. (<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-partai-pks>)

B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi

1. Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Misi

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.

Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industry pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembagalembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap

martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources & knowledge*.

Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa

dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

4. Menjadi pusat pelayanan yang informatif dan pusat pengaduan public yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif .
5. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi yang transparan dan akuntabel.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi secara optimal bagi pemangku kepentingan yang terkait. (<https://pks.id/content/visi-dan-misi-ppid>)

C. Susunan Kepengurusan Partai

Tabel 5. Struktur Kepengurusan DPTP Partai Keadilan Sejahtera

Ketua Majelis Syura Partai :Dr Salim Segaf Aljufri

Wakil Ketua Majelis Syura : Dr Hidayat Nur Wahid

Wakil Ketua Majelis Syura : Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.

Wakil Ketua Majelis Syura : Ahmad Heryawan, Lc., M.Si

Wakil Ketua Majelis Syura : Suharna Surapranata, MT

Sekretaris Majelis Syura : Ir. Untung Wahono, M.Si

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Dr. Ir. H Suswono, MMA

Ketua Dewan Syariat Pusat : Dr KH Surahman Hidayat

Presiden : H. Ahmad Syaikh

Sekretaris Jenderal : Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE

Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Kinerja, Administrasi dan Sistem

Informasi Pusat Data : Muhammad Arfian, MBA

Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan : Ayon

Prasetyawan, M.Sc

Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi : Zainudin Paru, S.H.,

M.H.

Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis : IIE Sumirat Sundana

Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga : Dr. Moh. Rozaq

Asyhari, SH, MH

Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Sugeng

Susilo

Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian : Haryo Setyoko, MPA

Wakil Sekretaris Jenderal Arsip dan Sejarah : T. Farida Rachmayanti, SE,

M.Si

Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik : Ahmad Fathul Bari,

S.Hum., M.S.M.

Bendahara : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

Wakil Bendahara Umum. : Deni Triesnahadi

Wakil Bendahara Umum. : Hero E.A. Putra, ST, M.Comm

Wakil Bendahara Umum. : Unggul Wibawa, Ak

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Sukamta,
Ph.D.

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan : H. Buchori, M.A

Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : Dr. Zulkieflimansyah

Ketua Bidang Pembinaan Kader : Drs. H. Muhammad Said, M.Hum

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa : Syahrul Aidi Mazaat

Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader :

Rofik Hananto

Ketua Bidang Kepemudaan : dr. Gamal, M.Biomed

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dr. Kurniasih

Mufidayati

Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari

Ketua Bidang Seni dan Budaya : Ecky Awal Mucharam

Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Dr. Al Muzammil Yusuf,

M.Si.

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Ir. Sigit Sosiantomo

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si

Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Dr.H. Ali Akhmadi,

M.A

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag,

M.Si

Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani

Ketua Bidang Ketenagakerjaan : M. Martri Agoeng

Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Riyono, S.Kel

Ketua Bidang Kepanduan : H. Yoyok Switohandoyo, ST

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) :

H. Hendry Munief, MBA

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) :

Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, MM

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat

(Banjabar) : drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan

Yogyakarta (Jatijaya) : Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Balinusra) : H. Johan Rosihan, ST

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan : H. Alifudin, S.E. , M.M.

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi : H. Suryadarma, Lc

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim) : Dr.H.

Muhammad Kasuba, M.A

Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi : T.B. Soemandjaja Rukmandis

Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah : Dr. Hermanto,, SE, M.Si

Ketua Komisi Kebijakan Publik : Memed Sosiawan, ME

Ketua Komisi Kajian Strategis : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si

Ketua Komisi Ideologi : Drs. Musoli

Ketua Komisi Ketahanan Keluarga : Dra. Wirianingsih, M.Si

Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik : H. Abdul

Muiz Saadiah, MA

Ketua Komisi Kajian dan Bayan : H. Abdullah Haidir, Lc

Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah : Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA

Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM : H. Iman Santoso, Lc, MEI

Ketua Komisi Keumatan : H. Zufar Bawazir, Lc

Ketua Fraksi MPR RI : Ir Tifatul Sembiring

Ketua Fraksi DPR RI : Dr Jazuli Juwaini, Lc, MM.

(www.pks.id)

D. Tujuan dan Fungsi Partai Keadilan Sejahtera

Kelahiran Partai PKS bukanlah semata-mata hadir dalam percaturan kekuasaan dan pergesekan kepentingan. Partai Keadilan Sejahtera terjun ke politik untuk suatu tujuan dan fungsi yang mulia, itu semua berdasarkan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera pada BAB III pasal 8, pasal 9, yaitu sebagai berikut :

Tujuan partai adalah:

1. Memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
3. Memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

4. Turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai berfungsi :

1. Menyelenggarakan pendidikan politik;
2. Menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara;
3. Memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik; dan
4. Memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Sejarah DPRD Kota Bandar Lampung

Tidak banyak literatur yang menjelaskan sejarah awal terbentuknya DPRD Kota Bandar Lampung. Namun demikian untuk menjelaskan terbentuknya DPRD Kota Bandarlampung ada satu referensi yang bisa dijadikan untuk menjelaskan sejarah DPRD Kota Bandarlampung, yaitu dokumen lukisan yang terpampang di gedung Utama DPRD Kota Bandarlampung.

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 1971 DPRD Kota Bandarlampung menggunakan sebutan DPRD Gotongroyong. Selama DPRD Gotongroyong setidaknya terdapat tiga periode kepemimpinan. Periode pertama yaitu sejak terbentuknya DPRD Gotongroyong sampai dengan tahun 1968, Lembaga ini diketuai oleh M.S. Idroes. Periode berikutnya yaitu tahun 1968 sampai dengan 1969 DPRD Gotongroyong dipimpin oleh Drs. Tjarmat dan pada periode

tahun 1969 sampai dengan 1971 DPRD Gotong royong diketuai oleh Damhuri.

Tahun 1971 sebutan DPRD Gotong royong berubah menjadi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung. Pada periode tahun 1971 sampai dengan 1977 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dipimpin oleh Firmansah Daud. Selanjutnya Periode 1977 sampai dengan 1982 dan 1982 sampai dengan tahun 1987 DPRD Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dipimpin oleh Mansur Ramelan.

Sebagai catatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, sebutan Kotamadya Daerah Tingkat (DATI) II Tanjungkarang-Telukbetung dirubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 dan Keputusan Walikota Bandarlampung Nomor 17 Tahun 1999 sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandarlampung dirubah menjadi Kota Bandarlampung.

Periode tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 DPRD Kotamadya Dati II Bandarlampung dipimpin oleh H. Iing Tazuddin, SH. Periode berikutnya yaitu 1992 sampai 1997 dan periode 1997 sampai 1999 DPRD Kota Bandarlampung dipimpin oleh M. Sodik.

Tahun 1999 Indonesia memasuki babak baru yaitu dari era Orde Baru menjadi era reformasi dan terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Umum yang

seharusnya Pemilihan Umum akan dilaksanakan tahun 2002 dimajukan dan diadakan Pemilihan Umum pada tahun 1999.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung pertama di era reformasi adalah Drs. H. Ridwan Sangkut dari PDI Perjuangan, yang memimpin DPRD Kota Bandar Lampung periode 1999-2004. Pada tahun 2002 H. Ridwan Sangkut Wafat sehingga kepemimpinan DPRD Kota Bandar Lampung digantikan oleh H.M. Hasyum Santosa dari PDI Perjuangan dari tahun 2002 sampai 2004. Periode 2004 sampai 2009 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. H. Azwar Yacub dari Partai Golkar. Periode tahun 2009-2014 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Budiman. AS dari Partai Demokrat.

Periode 2014 sampai 2019 DPRD Kota Bandar Lampung dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM dari PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung masa jabatan 2019 sampai 2024 dipimpin oleh H. Wiyadi. SP. MM (PDI Perjuangan) sebagai Ketua, Aderly Imelia Sari, ST. MT (Partai Gerindra) sebagai Wakil Ketua I, Aep Sarupudin, SP (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai Wakil Ketua II dan H. Edison Hadjar, SE (Partai Amanat Nasional) sebagai Wakil Ketua III. (<https://dprd-bandarlampung.go.id>)

F. Gambaran Umum Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para calon legislative DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai Keadilan Sejahtera yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019 dan tim pemenang partai PKS untuk pemilu Legislatif tahun

2019, yang dianggap mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi terkait Strategi Kampanye perolehan suara di DPD Dapil 6 kota Bandar Lampung dalam menghadapi pemilu Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung 2019.

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari para informan tersebut dianggap representatif, dan selesai apabila tidak terdapat lagi informasi lain atau sudah mencapai tingkat kejenuhan data. Informasi yang diambil oleh penulis sebanyak 5 orang. Penulis menganggap informan tersebut sebagai orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai caleg dan tim kerja partai yang berhasil memenangkan pemilu 2019, untuk lebih jelasnya informan tersebut akan penulis sajikan pada bentuk tabel berikut :

Tabel 5. Nama-Nama Informan dalam penelitian

No	Nama Informan	Alamat	Jabatan
1.	Aep Saripudin, SP.	Rajabasa, Bandar Lampung	Staf Protokol Wakil 2 DPRD Kota Bandar Lampung, ketua DPD PKS 2019, Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPTW PKS Provinsi Lampung.
2.	Agus Djumadi, A.Md	Jl. Geriya Sejahtera, Langkapura, Bandar Lampung	Ketua Fraksi PKS, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung, ketua MPD (Majelis Pertimbangan Daerah), Sekertaris DPD PKS 2019, Anggota Badan Anggaran DPRD kota Bandar Lampung, Bisnis vendor Perusahaan Kontraktor Komisaris PT. WSA

3.	Drs. Joko Mulyono, M. AP	Jl. Onta III sukamenanti baru, Kedaton, Bandar Lampung.	Ketua Komisi Kebijakan Publik MPW Lampung, Majelis Pertimbangan Wilayah DPTW PKS Provinsi Lampung.
4.	Raden Cik Awang, ST.	Perumahan Griya Assalam, Rajabasa, Bandar Lampung	Ketua Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPD PKS Kota Bandar Lampung, Wirausaha Konveksi.
5.	Suhendro Prihandono, S.IP	Perumahan Vila Marina, Blok D.52, Suka Bumi, Bandar Lampung.	Sekbid/Kabit 2018-2020 Politik Hukum dan Keamanan DPD PKS Kota Bandar Lampung, Ketua Bidang Hukum Kebijakan Publik DPD PKS Bandar Lampung 2020-2025, Tenaga Ahli Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung.

sSumber: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2019

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera dalam Mendulang Suara Pemilu Legislatif. Studi pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian strategi kampanye partai keadilan sejahtera dalam mendulang suara pemilu legislatif strategi awal yang dilakukan oleh partai PKS menjadi 4 Point, dilakukan cara, yaitu : (a) strategi awal mulanya ada pada internal partai yang mana ada di penguatan kader PKS dari merekrut orang-orang yang memiliki potensi modal sosial maupun penunjang lainnya di tengah masyarakat, (b) menyaring para kader berdasarkan letak geografis tempat dia berasal guna mempermudah pemetaan strategi yang digunakan kader untuk bersosialisasi ditengah masyarakat, karena kader sebagai ujung tombak perjuangan partai dipilih.

(c) penggolongan calon legislatif yang akan ditempatkan pada masing-masing daerah, caleg dipilih berdasarkan potensi-potensi yang ada baik itu kekuatan finansial, pengalaman, dan pada tingkat popularitas caleg, terkhusus peneliti menitik beratkan dari Dapil 6 bahwa caleg yang dipilih

adalah caleg yang memiliki kemampuan dari segala segi penguasaan gaya komunikasi dimasyarakat, yang mempunyai ketokohan, tidak lupa juga dibantu oleh para kader untuk para caleg maksimal kinerjanya dengan menempatkan ketua-ketua dpc sebagai ujung tombak diwilayah tersebut. (d) strategi eksternal partai yaitu melalui penggunaan media massa, media sosial sebagai alat kampanye atau sosialisasi politik.

2. Marketing politik yang dilakukan oleh DPD Partai PKS kota Bandar Lampung yang meliputi : (a) *Product* (produk politik) Produk partai PKS ada pada pengkaderan dengan proses serangkaian pembinaan dan ujian dari dalam Partai maka mereka sangat matang dari segi visi-misi, kemampuan organisasi, kemampuan bersosialisasi, bermasyarakat, ideologi yang kuat, kemudian program kegiatan-kegiatan yang unik berkarakteristik yang dapat menarik hati pemilih, dan juga tidak lupa dibantu dengan adanya sistim kader yang solid dan sangat loyal kepada partai PKS.

(b) *Price* (biaya politik), yang dikeluarkan oleh calon legislatif dari partai PKS itu relatif sesuai dengan keadaan kemampuan person caleg, ada yang mulai dari sebesar Rp.5 juta selama setahun dengan kategori *low coast*, adapun bagi mereka yang memiliki kemampuan *coast* politik yang lebih besar mereka bisa mengeluarkan Rp. 100 sampai Rp. 200 juta, untuk caleg yang memiliki keterbatasan biaya politik maka sistem kader dan struktur partai yang akan membantu proses kampanye caleg. (d) *Place* (penempatan/segmentasi) pada segmentasi awal partai PKS adalah basis

wilayah suara partai yang memiliki prospek suara namun tetap harus ada pemeliharaan basis suara guna suara yang memiliki prospek tersebut tidak jatuh ke partai lain, tidak jarang suara yang memiliki prospek tersebut digoyahkan dengan metode yang illegal contohnya dengan Politik uang.

B. Saran

1. Pada saat rekrutmen calon legislatif, partai PKS seharusnya lebih memperhatikan kualitas yang dimiliki oleh setiap bakal calon, artinya setiap bakal calon semestinya harus memiliki kemampuan dalam segi *Coast Politik* yang kuat. Karena jika melihat partai kompetitor ataupun bakal calon yang diusung oleh partai kompetitor mereka tidak jarang sangat memfokuskan dalam segi *Coast Politik* ini. Jika demikian terlaksana maka InsyaAllah Partai PKS dengan kekuatan yang adapada system kader dan Struktur partai lebih bersinergi lagi jika diimbangi dengan Biaya Politik yang kuat. Bukan tidak mungkin perolehan kursi akan meningkat pada tiap menghadapi Pemilu berikutnya.
2. Persyaratan untuk bakal calon legislatif harus lebih diperketat lagi, sehingga anggota-anggota dewan yang terpilih merupakan sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Ikrar Mandiri Abadi: Yogyakarta. 247 halaman.
- Cangara, Hafied. 2016. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. 560 hlm.
- Firmanzah, 2012. *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Haricahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya, cetakan kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ibid Hal.18
- McCarthy, E. Jerome. (1975) *Basic Marketing: A Managerial Approach, fifth edition*.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 404.
- Moleong, J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nursal, Adman. 2004. *Political marketing: strategi memenangkan pemilu : sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Gramedia Pustaka Utama. 316 halaman.
- Rohyati, Any.Dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuasa.
- Schroder, Peter. 2010. *Strategi politik, Friedrich Ebert Stiftung (FES)*, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syarbaini, Syahrial Rusdiyanta, Doddy Wihardi. *Pengetahuan dasar ilmu politik*, bogor: ghalia indonesia, 2011.

Venus, Antar. 2004. *Manajemen Kampanye*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Skripsi/Jurnal

Aditya Perdana (2009) *Civil Society Dan Partai Politik Dalam Demokratisasi Di Indonesia*.

Aprilia (2019). *Politik dinasti dalam rekrutmen calon legislatif pdip pada pemilu legislatif 2019 (studi di dpd partai demokrasi indonesia perjuangan provinsi lampung)*

Edy Sanjaya S. (2019). *Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015*.

Fylan, 2005. *Semi Structured Interviewing*. Oxford University Chapter 6.65-77.

Rofika Shopia (2014) *Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Di Wilayah Kota Pekanbaru Dalam Menyerap, Menghimpun Dan Menyalurkan Aspirasi Politik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atasundang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*.

Yurike Pratiwi S. (2017). *Strategi Kampanye Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Di Dewan Perwakilan Cabang Tanjung Karang Pusat)*.Skripsi Ilmu Sosial dan Politik.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Pasal1 ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011.

KPU Provinsi Lampung Tahun 2014 dan 2019.

Website :

(<http://kpu-bandarlampungkota.go.id/berita/tingkat-partisipasi-capai-886-persen-kpu-berterimakasih-pada-masyarakat/> : pukul 13.16 :27 mei 2020).

(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/507-peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis.html>/diakses pada 25 mei 2020, pukul 14:37 WIB).

Ihsanuddin. 2018. Suami, Istri, Anak, Mertua, Menantu Jadi Caleg Asal Lampung pada Pileg 2019 dalam [TribunLampung.co.id](http://tribunlampung.co.id) edisi 19 Agustus 2018, diakses dari <http://lampung.tribunnews.com/2018/08/19/>, pada tanggal 26 Mei 2020, pukul 22.01 WIB.